

ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH KAMPUNG LINGGANG MAPAN KECAMATAN LINGGANG BIGUNG KABUPATEN KUTAI BARAT BIDANG PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF GOVERMENT SPENDING

Racsel Anugrah¹ Budiman²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengeluaran pemerintah bidang pembangunan dalam perspektif Government Spending di kampung Linggang Mapan kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui gambaran nyata atas kejadian yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi tentang adanya pengeluaran pemerintah Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat bidang Pembangunan dalam perspektif Government Spending. yang sedang berlangsung dan juga melalui pengamatan yang dituliskan peneliti dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang telah diperoleh melalui proses wawancara tentang Seperti apa pengeluaran pemerintah Kampung Linggang Mapan bidang pembangunan dalam perspektif government spending.

Kata Kunci : analisis pengeluaran pemerintah kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat bidang pembangunan

Pendahuluan

Pembangunan merupakan usaha atau upaya perubahan proses sosial yang dimana sifatnya menyeluruh, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Pembangunan guna terwujudnya masyarakat yang lebih baik perlunya peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yakni mengarahkan masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan, demi terciptanya kemakmuran di dalam kehidupan masyarakat. dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat¹ berarti tidak bisa di lepaskan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan, melainkan perlu adanya dorongan dan keterlibatan langsung pemerintah terhadap pemberdayaan pembangunan (Alexander 1994). Dalam

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: racselanugrah457@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Undang Undang Pemerintahan Desa No.6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi rujukan dalam pembangunan Desa, penataan tata kelola Desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah pedesaan yang terintegrasi serta keberlanjutan menuju Desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan. Selain itu aspek pembangunan tidak hanya sekedar tertuju pada masyarakat yang ada di masa sekarang tetapi juga tertuju pada masyarakat di masa depan. Di dalam Pembangunan sebenarnya dapat mencakup berbagai aspek yang ada di dalam masyarakat desa.

Menurut Ranaekek (2022) Pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dalam upaya tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan dalam pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki, sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Konsep pembangunan merupakan suatu hal yang menjanjikan. Dalam pembangunan berkelanjutan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan, pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11). Pembangunan menurut Rogers (Rochajat, dkk. 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.

Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok diantaranya yang pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi. kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Kerangka Dasar Teori

Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan terhadap kemasyarakatan desa, dan proses pemberdayaan desa dan masyarakat desa harus senantiasa berlandaskan dan didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bersifat konstitusi, dan dalam pengaturan dan pengelolaan tentang desa juga harus dapat senantiasa untuk menjaga dan menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus senantiasa untuk memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan dari “Bhineka Tunggal Ika” sebagai suatu simbol atau lambang dari keanekaragaman suku bangsa, ras, golongan, dan agama yang ada di Indonesia, sehingga dalam pengaturan dan pengelolaan tentang pemerintahan desa dan masyarakat desa harus lebih bersifat atau lebih mempertimbangkan hal-hal yang mengakui tentang keberadaan dari suatu nilai - nilai “bhineka Tinggal Ika” tersebut.

Pembangunan Desa

Berdasarkan peraturan undang undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

Pembangunan desa dibangun untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan.] Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana- sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.

Skala prioritas pembangunan Desa yang meraju pada pengembangan desa meliputi :

1. Pengembangan Ekonomi Lokal
Menurut (Blakely dan Bradshaw, 1994) Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan proses di mana pemerintah local
2. Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Widjaja (2003) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat bisa mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.
3. Pembangunan Prasarana dan Sarana
Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (spatial space) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Infrastruktur metujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg,1988 dalam Kodoatie,2005:8).
Sementara itu adapun pengertian prasarana menurut Jayadinata (1992 dalam Juliawan,2015:5) prasarana merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalاندengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai, prasarana kota merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota.
4. Pengembangan Kelembagaan
Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Ruttan dan Hayami: 1984).

Pengeluaran Pemerintah (Government Spending)

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Menurut Usmani (2011) anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya. Pengertian Pengeluaran Pemerintah menurut Sukirno (2011)

adalah keseluruhan pengeluaran yang dilakukan yaitu pengeluaran yang meliputi konsumsi dan investasi.

Menurut Susanti pengeluaran pemerintah (2000) merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu teori makro dan teori mikro.

Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ;

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai
3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepadawarganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat

Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda. Sedangkan dalam tinjauan mikro, perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut, selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Terkait dengan perkembangan pengeluaran pemerintah, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ;

1. Perubahan permintaan akan barang publik
2. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi
3. Perubahan kualitas barang publik
4. Perubahan harga faktor produksi.

Menurut jenis kegiatan berdasarkan Pemendagri No. 13 tahun 2006 Pasal 50, pengeluaran pemerintah daerah dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Jenis belanja langsung terdiri dari;

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran dalam bentuk pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah, mesin, bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya.

4. Belanja Tak Langsung

Tidak Langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. keberadaan belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi dari ada tidak.

Berdasarkan ketentuan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Adapun dari pada Pengeluaran pemerintah yang dihabiskan pemerintah untuk barang dan jasa atau item lainnya. Contohnya adalah pengeluaran untuk kegiatan operasional dan investasi layanan publik seperti pertahanan, pendidikan, perlindungan sosial, dan perawatan kesehatan. Selain itu, beberapa pengeluaran mungkin tanpa melibatkan pertukaran barang dan jasa seperti pembayaran transfer. Dapat disimpulkan bahwasannya pengeluaran pemerintah merupakan anggaran yang digunakan pemerintah dalam membiayai berbagai kegiatan dan pengeluaran lainnya guna menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat secara keseluruhan. Peran pemerintah sangatlah penting untuk mengatur jalannya perekonomian agar tercipta stabilitas pada sistem perekonomian.

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan penulis cermati, seharusnya jelas bahwa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif, khususnya studi kasus sebagai fokus utama dan teknik untuk menyelidiki dan memahami signifikansi yang dikaitkan dengan beberapa orang atau kelompok orang, masalah sosial atau kemanusiaan.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian yang tujuan utamanya adalah mengembangkan penjelasan yang tidak memihak tentang keadaan tertentu. Tugas penting termasuk dalam proses penelitian kualitatif ini, seperti mengembangkan pertanyaan dan prosedur, mendapatkan data tertentu dari partisipan, menyimpulkan tema umum dari topik tertentu, dan menilai signifikansi data. Struktur atau kerangka laporan akhir penelitian dapat di adaptasi. Partisipan dalam jenis penelitian ini diharuskan mengadopsi gaya perspektif penelitian induktif, berkonsentrasi pada makna individu dalam melakukan penelitian ini yang menjadi sumberdata/key informant maupun informant yang akan di mintai informasinya berkenaan dengan fokus penelitian yaitu Kepala Kampung, Kepala Badan Permusyawaratan Kampung, dan Masyarakat Kampung Linggang Mapan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kabupaten Kutai Barat

Secara Geografis, Kabupaten Kutai Barat terletak diantara 113O45'05" Bujur Timur hingga sampai dengan 116O31'19" Bujur Timur dan juga 103o1'05" Lintang Utara hingga sampai dengan 100o9'33" Lintang Selatan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, KabupatenKutai Barat ialah merupakan sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten Kutai Kartanegara yang berada pada Provinsi Kalimantan Timur. Lalu luas wilayah Kabupaten Kutai Barat yang diketahui yaitu 20.384,60 km2.

Wilayah administrasi di Kabupaten Kutai Barat telah dibagi menjadi 16 kecamatan dan juga 191 Kampung/Kelurahan yang terdiri atas 4 Kelurahan, dan juga 190 kampung definitif. Berikut ini adalah tampilan dari tabel pembagian luas wilayah Kecamatan dan jumlah Kampung/Kelurahan serta gambar peta Kabupaten Kutai Barat.

Kecamatan Linggang Bigung

Kecamatan Linggang Bigung ini dihuni oleh 3.953 KK. Jumlah keseluruhan penduduk yang berada di Kecamatan Linggang Bigung adalah 13.657 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 7.190 orang dan jumlah penduduk perempuan 6.467orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Linggang Bigung adalah 19 jiwa/km.Merujuk pada Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014 yang berkaitan dengan desa, dimana desa merupakan obyek bantuan dari pemerintah pusat dalam rangka memajukan perekonomian desa. Selain itu juga konsep pemberdayaan adalah prioritas utama dalam rangka memajukan kesejahteraan dalam masyarakat desa. (Dika Amir Pratama, 2016).

Kampung Linggang Mapan

Berdasarkan Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kampung adalah sebutan Desa dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Linggang Mapan adalah salah satu kampung/desa di Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, penduduk di kampung Linggang Mapan sebanyak memiliki jumlah sebanyak 1150 jiwa yang terbagi dalam Lima RT. Linggang Mapan mempunyai kode wilayah menurut kemendagri 64.07.15.2005, Sedangkan kode posnya adalah 75576.

Kampung Linggang Mapan pertama kali di pimpin oleh Haji Empo Tuyuq yang merupakan keturunan dari para bangsawan yang berapa di Kawasan Tonyoi/Tunjung Rentenungk, kemudian dilanjutkan oleh Empo Ruwent yang juga merupakan keturunan bangsawan di Kawasan kampung Linggang yang merupakan pusat dari seluruh kampung yang berada di dalam Rumpun Rentenungk.

Pada masa pemerintahan Haji Empo Tuyuq sampai kepada masa pemerintahan Empo Ruwent sebagai syarat untuk mendirikan sebuah kampung adalah wilayah tersebut harus terlebih dahulu memiliki atau mendirikan sebuah Lamin, dalam proses pembuatan sebuah Lamin harus melalui ritual adat yang banyak dan Panjang sehingga memakan waktu yang sangat lama.

Sejarah Kampung Linggang Mapan sendiri tidak terlepas dari penyebaran agama Kristen Protestan yakni agama Advent, agama Advent pertama yang masuk ke Kampung Linggang Mapan pada awal tahun 1973 disebarkan oleh para misionari asing yang berkebangsaan Jerman yang kemudian menggagas dibangunnya lapangan terbang perintis yang di beri nama Peninyau sebagai penunjang akses transportasi pada saat itu. Pada saat pertama terbentuknya Kampung Linggang Mapan daerahnya meliputi Kampung Linggang Melapeh dan Kampung Linggang Amer terbukti dengan adanya peninggalan leluhur masyarakat Kampung Linggang Mapan berupa lembo/munan di kedua kampung tersebut.

Seiring dengan perkembangan jaman yakni masa periode orde baru pada tahun 1975 semakin terbukanya isolasi perubahan dengan terbukanya akses jalan dan cara perladangan yang berpindah-pindah semakin tergeserkan karena adanya bimbingan/penyuluhan perkebunan maka masyarakat Sebagian besar menanam karet sebagai sumber mata pencaharian inti, dari menanam karet dengan hasil yang

masyarakat kampung sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidup karena hasil dari karet sangat menjanjikan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian adalah pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya. Jadi, pembahasan hasil penelitian merupakan bahasan terhadap temuan yang diperoleh. Menurut Ary (2007) pembahasan hasil penelitian adalah penafsiran hasil penelitian yang berkaitan dengan Hipotesis Bagian ini berisi paparan objektif peneliti terhadap hasil-hasil penelitian, antara lain: penemuan-penemuan penelitian, penjelasan serta penafsiran dari data dan hubungan yang diperoleh, serta pembuatan Generalisasi dari penemuan. Apabila terdapat Hipotesis, maka pada bagian ini juga menjelaskan proses pengujian hipotesis beserta hasilnya.

Hasil penelitian harus disajikan secara jelas dan sistematis supaya mudah dibaca dan dipahami. Jogiyanto (2015) menyatakan bahwa hasil pengujian Analisis dalam suatu penelitian yang tidak dibahas menunjukkan bahwa peneliti tidak mempunyai konteks ceritera dari hasil penelitiannya. Hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka Teori Setelah memperoleh hasil penelitian maka hasil itu akan dibahas untuk menemukan fokus permasalahannya.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Analisis Pengeluaran Pemerintah Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat Bidang Pembangunan Dalam Prespektif Government Spending dapat diidentifikasi berdasarkan hal hal berikut :

1. Dengan Demikian Penulis melihat Serta Mengobservasi Langsung kondisi pembangunan yang terjadi di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, dimana hingga saat ini beberapa aspek pembangunan belum memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan Kampung. Dengan demikian pembangunan yang ada di Kampung Linggang Mapan ini telah di buat oleh pemerintah Kampung namun tidak berfungsi secara maksimal sampai saat ini karena tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, Pembangunan kolam dan jalan yang di buat oleh pemerintah KampungLinggang Mapan itu sendiri di bangun guna membawa daya tarik masyarakat luar,akan tetapi hingga saat ini pembangunan kolam yang dibangun di KampungLinggang Mapan mengalami kejeblan yang membuat bangunan ini rusak parah sehingga

fasilitas yang ada di sekitar bangunan juga tidak dapat di fungsikan secara efektif, sampai saat ini bangunan ini mangkrak dan masih belum bisa di fungsikan dikarenakan pembangun yang tidak memiliki dampak positif yang Panjang bagi masyarakat.

2. Tidak hanya itu pembangunan yang di bangun bukan hanya kolam saja, namun ada pembangunan jalan yang dibuat atau dibuka oleh pemerintah Kampung Linggang Mapan pada tahun 2020 juga tidak tepat sasaran sehingga jalan tersebut sampai saat ini hanya di tumbuh semak belukar, dari Beberapa program pembangunan yang di bangun oleh pemerintah kampung Linggang Mapan saat ini belum adanya tindak lanjut dari pemerintah Kampung karena tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Dengan Demikian penulis dapat Menyimpulkan bahwa sampai saat ini Masyarakat masih belum puas atau merasakan dampak positif dari kebijakan yang dibuat, karena menurut masyarakat anggaran yang besar seperti pembangunan kolam yang sangat menelan biaya cukup besar itu bisa dialihkan ke investasi kampung sealian itu juga masyarakat menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pembangunan guna Perkembangan Ekonomi yang lebih baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintahan Kampung Linggang Mapan tetap berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang semakin baik kepada masyarakat sampai akhir periode masa jabatannya, selain itu Diharapkan pemerintahan Kampung Linggang Mapan lebih bersikap adil dan bijaksana dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di Kampung Linggang Mapan.
2. Diharapkan pembangunan infrastruktur yang telah ada di Kampung Linggang Mapan ini terus dapat dijalankan dan berkelanjutan sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
3. Diharapkan untuk di masa yang akan datang kegiatan pembangunan infrastruktur lebih ditingkatkan agar pendapatan masyarakat dapat meningkat.
4. Diharapkan masyarakat tetap aktif dalam setiap kegiatan pembangunan infrastruktur karena dalam pembangunan ini masyarakat merupakan tokoh utama dalam keberhasilan suatu pembangunan.

Daftar Pustaka

Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerepan. Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press. 2007.

- Adisasmita Rahardjo. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Cetakan Pertama. 2016.. Bahtiar Wardi. Metode Penelitian Dakwah. Jakarta: Logos. 1997.
- Bintaro R. Dalam Interaksi Desa, Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1089.
- Ahmad, J. (2015). Metode Administrasi Publik Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media.